

RENCANA KERJA

TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2026. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 merupakan turunan target kinerja yang akan dicapai setiap tahunnya yang berpedoman pada Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026 yang sudah ditetapkan sebelumnya, serta merupakan upaya untuk mencapai visi misi Wali Kota Bontang yang sudah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026 ini disusun sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan hingga subkegiatan Badan Pendapatan Daerah tahun 2026. Diharapkan Rencana Kerja ini dapat dijadikan sebagai sarana dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa yang akan datang oleh para pimpinan dan segenap elemen Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

Demikian Rencana Kerja ini kami susun, apresiasi sebesar-besarnya diberikan kepada seluruh elemen yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja ini, sehingga dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 ini dapat disajikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahun 2026 dan semoga apa yang ditargetkan dan termuat dalam Rencana Kerja ini dapat dicapai. Kami harapkan kritik dan saran guna menyempurnakan substansi Rencana Kerja ini. Semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan khususnya sektor Pendapatan Asli Daerah di Kota Bontang.

Bontang, 24 Agustus 2025
Kepala Badan Pendapatan Daerah,



SYAHRUDDIN, S.E., M.A., M.Eng

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19740210 200502 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika dan Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang	17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang	19
2.3.1 Permasalahan dan Hambatan dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang.....	24
2.3.2 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
2.3.3 Rekomendasi dan Catatan Strategis untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan pada Tahun yang Direncanakan. .	25
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	26
BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	33
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	33
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2026.....	35
BAB V PENUTUP	43

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian nilai pendapatan asli daerah	7
Tabel 2.2	Faktor penyebab tidak tercapai, tercapai dan capaian melebihi target kinerja program/kegiatan	8
Tabel 2.3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah s.d Tahun 2025 Kota Bontang	12
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang	18
Tabel 2.5	Perkembangan Pembayaran dan Tunggakan PBB Tahun 2019-2023	21
Tabel 2.6	Perkembangan Penetapan SKPD dan Tunggakan Pajak Non PBB dan BPHTB Tahun 2021-2023	22
Tabel 2.7	Review Rancangan Awal Terhadap RKPD Tahun 2026 Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang	27
Tabel 4.1	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang.	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Fungsi Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah sebuah dokumen resmi menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Tahun 2021-2026. Renja Perangkat Daerah tahun 2026 akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2026, serta digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah diubah Kembali dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan subpengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Rencana Kerja Bapenda merupakan dokumen perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan Program Pembangunan Pemerintah Daerah dalam satu tahun, maka dokumen ini disusun mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kota Bontang khususnya dan Nasional pada umumnya.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang disusun berlandaskan pada :

- 1) Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 38396) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
 - 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- 9) Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2026 Kota Bontang;
- 10) Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor Tahun 2018 Nomor 5);
- 11) Peraturan Walikota Bontang Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 50).
- 12) Peraturan Walikota Bontang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2026 adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Pembangunan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Bapenda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2026.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menjadi dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dan sebagai bahan pengendalian kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang pada tahun 2026;
2. Merumuskan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang pada tahun 2026;
3. Merumuskan rencana kerja dan pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang pada tahun 2026.

1.4 Sistematika dan Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
Menjelaskan latar belakang penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2026.
- 1.2 Landasan Hukum
Menjelaskan dasar hukum yang dijadikan pedoman penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2026.
- 1.3 Maksud dan Tujuan
Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2026.
- 1.4 Sistematika Penulisan

Memuat pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang 2026, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN LALU

- 2.1 Memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bapenda Tahun Lalu di Tahun 2024 (n-2) dan perkiraan capaian di tahun berjalan di tahun 2025 (n-1). Selanjutnya dikaitkan dengan Rencana Strategis Bapenda berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Bapenda di tahun-tahun sebelumnya. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan renja Bapenda di tahun lalu, menjelaskan realisasi program/kegiatan yang tidak, telah terpenuhi dan melebihi pencapaian target serta menjelaskan faktor-faktor juga kebijakan/tindakan penyebabnya serta implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, menjelaskan mengenai capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, menjelaskan mengenai tingkat capaian kinerja pelayanan, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan serta isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan telaahan terhadap rancangan awal RKPD untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Bapenda dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Bapenda.

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bapenda.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapenda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Bapenda.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA

Penyusunan Penyusunan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan kinerja serta indikator sub kegiatan dilakukan penyesuaian berdasarkan KEPMENDAGRI nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

BAB V. PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

Capaian kinerja Renja Bapenda, merupakan gambaran atas evaluasi rencana kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dalam setiap tahun pelaksanaannya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Bapenda. Target kinerja yang dimaksud merupakan sasaran dengan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program/kegiatan/ subkegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan,

Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang pada Tahun Anggaran berjalan yaitu di tahun 2025 dan di tahun-tahun sebelumnya mempunyai 2 (dua) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan 8 Kegiatan diantaranya yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan
8. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan berdasarkan capaian renstra (2021 sd 2025) yaitu sebagai berikut :

1. Pada Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan indikator kinerja persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah target kinerja akhir tahun 2026 sebesar 100 persen, realisasi indikator kinerja pada tahun 2023, 2024 dan target di tahun 2025 yaitu 100 persen sehingga tingkat perkiraan capaian realisasi target renstra pada tahun 2026 adalah sebesar 100%, hal ini diterangkan bahwa tujuh kegiatan dalam pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah pada Badan Pendapatan Daerah telah terlaksana berdasarkan target yang telah ditentukan sehingga tingkat capaian realisasi sebesar 100%.

2. Pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator kinerja persentase capaian pendapatan asli daerah target kinerja akhir tahun 2026 sebesar 100 persen, realisasi indikator kinerja pada tahun 2023, 2024 telah melebihi dari target yang ditentukan dan target di tahun 2025 yaitu 100 persen sehingga tingkat perkiraan capaian realisasi target renstra pada tahun 2026 adalah sebesar 100%, hal ini diterangkan bahwa satu kegiatan dalam pencapaian pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah telah terlaksana berdasarkan target yang telah ditentukan sehingga tingkat capaian realisasi sebesar 100 persen. Capaian nilai pendapatan asli daerah yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian Nilai Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase (%)
2023	208.097.914.195,00	264.421.428.875,68	127,07%
2024	296.329.967.393,00	329.657.276.443,99	111,24%
2025	384.830.817.025,00	207.568.317.102,37	54,32%

*merupakan capaian PAD hingga triwulan II tahun 2025

3. Capaian realisasi target renstra di tahun 2026 dengan tiga puluh tiga sub kegiatan yang mendukung kinerja Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2023, 2024 dan 2025 mempunyai nilai capaian dengan persentase yang sangat fluktuatif dimana pada sub kegiatan yang bersifat wajib dan rutin rata-rata realisasi belanja pada tahun 2024 mencapai 94.63 persen, sedangkan pada sub kegiatan teknis yang mendukung kegiatan pelayanan pendapatan asli daerah rata-rata capaian realisasinya adalah sebesar 92.38 persen dimana seluruh subkegiatan capaian realisasi belanjanya berada diatas 50%.
4. Faktor penyebab tidak tercapai, tercapai dan capaian melebihi target kinerja program/kegiatan dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Faktor penyebab tidak tercapai, tercapai dan capaian melebihi target kinerja program/kegiatan Tahun 2024

Sub Kegiatan	Capaian Realisasi	Keterangan Faktor Penyebab
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	99,99%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	99,55%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	98,92%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	98,92%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	93,63 %	Terlaksana secara rutin sesuai kebutuhan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0%	Anggaran digeser untuk memenuhi belanja mendesak
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0%	Anggaran digeser untuk memenuhi belanja mendesak
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	99,92%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	92,36%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	94,14%	Terlaksana secara rutin sesuai kebutuhan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.78%	Terlaksana secara rutin sesuai kebutuhan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98.51%	Terlaksana secara rutin sesuai kebutuhan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	95.86%	Terlaksana secara rutin sesuai kebutuhan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	92,27%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.31%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Pengadaan Mebel	96.16%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.52%	Terlaksana secara rutin sesuai kebutuhan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.12%	Terlaksana secara rutin sesuai kebutuhan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.83%	Terlaksana secara rutin sesuai kebutuhan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94.19%	Terlaksana secara rutin sesuai kebutuhan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0%	Anggaran digeser untuk memenuhi belanja mendesak
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	82.58%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta	87.77%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan

Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	92.58%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	97.74%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Pengolahan, pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	93.19%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB)	95.88%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	92.24%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	98.91%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Penagihan Pajak Daerah	83.47%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	59.96%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	64.3%	Terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan

5. Implikasi serta kebijakan dalam mengatasi faktor-faktor penyebab target kinerja yang direncanakan tidak tercapai adalah sebagai berikut:
- Penyusunan perencanaan kegiatan dengan lebih matang agar menghasilkan output mendukung kinerja utama instansi
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin dan terus menerus terkait pencapaian kinerja keuangan, baik belanja maupun pendapatan, sehingga kinerja keuangan dapat termonitor dengan baik sehingga risiko-risiko yang ada dapat diantisipasi dengan baik.

- Pelaksanaan pemetaan potensi pendapatan yang lebih realistis untuk mendukung optimalisasi penerimaan pendapatan, dalam hal ini pajak daerah. Karena, trend penerimaan pajak daerah yang cenderung fluktuatif setiap bulannya.
- Pelaksanaan pemantauan terhadap faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat pencapaian kinerja instansi, dalam hal ini monitoring terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, penjarangan terhadap potensi wajib pajak baru, serta kegiatan validasi data wajib pajak.

Hasil evaluasi pelaksanaan renja dan capaian renstra Bapenda Kota Bontang disajikan pada tabel 2.3 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis
Badan Pendapatan Daerah s.d Tahun 2025 Kota Bontang

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra) Tahun 2026		Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023		Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) sd 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%	9		10 = 5 + 7 + 9	11 = 10/4 x 100%	
xx	xx	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	100	Persen	100%
x	xx	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	25	dokumen	14	Dokumen	6	dokumen	6	dokumen	100%	100	Persen	22	Persen	400%
x	xx	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	dokumen	7	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	100%	2	dokumen	10	Dokumen	143%
x	xx	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	6	dokumen	3	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	4	dokumen	67%
x	xx	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	6	dokumen	0	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	3	dokumen	50%
x	xx	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	laporan	4	dokumen	1	laporan	1	dokumen	100%	1	dokumen	5	dokumen	83%
x	xx	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	84	dokumen	43	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	100%	3	dokumen	49	Persen	119%
x	xx	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	dokumen	42	orang/bulan	40	orang/bulan	40	orang/bulan	100%	43	orang/bulan	126	orang/bulan	175%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra) Tahun 2026		Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023		Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan									
			6	laporan	3	laporan	1	laporan	1	laporan	100%	1	laporan	4	laporan	67%					
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10/4 x 100%											
x	xx	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	6	laporan	3	laporan	1	laporan	1	laporan	100%	1	laporan	4	laporan	67%
		01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	laporan	-	laporan	-	laporan	-	-	laporan	1	laporan	1	laporan	-
x	xx	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6	dokumen	-	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	3	dokumen	50%
x	xx	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	300	Persen	100%
x	xx	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	283	stell	245	stell	5	paket	5	paket	100%	1	paket	246	paket	87%
x	xx	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	49	orang	84	orang	106	orang	108	orang	100%	12	orang	66	orang	135%
x	xx	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	12	Bulan	12	Bulan	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	195	Persen	833%
x	xx	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Item	6	Paket	1	paket	1	paket	100%	1	paket	7	paket	175%
x	xx	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	Jenis	13	Paket	5	paket	5	paket	100%	5	paket	18	paket	200%
x	xx	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	Item	14	Paket	1	paket	11	paket	100%	1	paket	15	paket	150%
x	xx	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7	Item	6	Paket	1	paket	7	paket	100%	1	paket	7	paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra) Tahun 2026		Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023		Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan									
			Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1 2025)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) sd 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)													
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9	10 = 5 + 7 + 9	11 = 10/4 x 100%											
x	xx	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	8700	Eksemplas	0	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	1.201	dokumen	14%
x	xx	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	331	Kali	42	Laporan	160	laporan	194	laporan	100%	120	laporan	418	laporan	126%
x	xx	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan	3	Item	3	Unit	100	persen	100	persen	100%	100	persen	203	persen	3333%
x	xx	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	Item	3	Unit	1	unit	1	unit	100%	1	unit	35	unit	1167%
x	xx	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	12	Bulan	12	Bulan	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	212	Persen	833%
x	xx	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4500	Lembar	1.200	Laporan	1	laporan	1	laporan	100%	1	laporan	1.202	laporan	27%
x	xx	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	12	Bulan	24	Laporan	12	laporan	12	laporan	100%	12	laporan	48	laporan	400%
x	xx	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	282	Orang	24	Laporan	12	laporan	53	laporan	100%	53	laporan	220	laporan	78%
x	xx	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan BMD	12	Bulan	12	Bulan	100	Persen	100	Persen	100%	100	Persen	212	Persen	833%
			01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	unit	-	unit	-	unit	-	unit	-	unit	13	unit	-
x	xx	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33	unit	33	unit	34	unit	34	unit	100%	34	unit	87	unit	264%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra) Tahun 2026		Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023		Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) sd 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%	9		10 = 5 + 7 + 9	11 = 10/4 x 100%	
x	xx	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	jenis	2	jenis	30	unit	30	unit	100%	30	unit	57	unit	1140%
x	xx	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	gedung	1	gedung	1	unit	1	unit	100%	1	unit	3	unit	300%
x	xx	04				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100	persen	100	persen	113,23	persen	100	persen	100%	100	persen	313	persen	100%
x	xx	04	2	01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	12	bulan	12	bulan	113,23	persen	100	persen	100%	100	persen	225	persen	833%
x	xx	04	2	01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	5	dokumen	-	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	2	dokumen	1	dokumen	20%
x	xx	04	2	01	02	Analisa dan Pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	15	dokumen	6	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	2	dokumen	14	dokumen	280%
x	xx	04	2	01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	7	laporan	4	laporan	8	laporan	8	laporan	100%	2	laporan	10	laporan	143%
x	xx	04	2	01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	6	Sarana dan prasarana	-	Sarana dan prasarana	18	unit	18	unit	100%	14	unit	32	unit	533%
x	xx	04	2	01	06	Pengolahan, pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4	laporan	2	laporan	3	laporan	3	laporan	100%	3	laporan	8	laporan	200%
x	xx	04	2	01	07	Penilaian Pajak bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBPP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	12.000	WP	4.000	WP	30.000	obyek pajak	43.250	obyek pajak	100%	8.800	obyek pajak	14.800	obyek pajak	123%
x	xx	04	2	01	09	Pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	10	laporan	11	layanan	11	layanan	11	layanan	100%	11	layanan	26	layanan	260%
x	xx	04	2	01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	8	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	2	dokumen	8	dokumen	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra) Tahun 2026		Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023		Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) sd 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%	9		10 = 5 + 7 + 9	11 = 10/4 x 100%	
x	xx	04	2	01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	5	dokumen	2	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	4	dokumen	80%
x	xx	04	2	01	13	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan pajak daerah	Jumlah Dokumen hasil pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	15	dokumen	2	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	4	dokumen	400%
x	xx	04	2	01	15	Elektronifikasi Transaksi pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-	laporan	-	laporan	1	laporan	1	laporan	100%	1	laporan	2	laporan	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan subpengelolaan pendapatan daerah. Dasar pembentukan pelaksanaan adalah Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Bontang No. 49 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, yang kemudian diganti dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Bapenda dalam melaksanakan tugasnya di bidang keuangan subpengelolaan pendapatan, menyelenggarakan fungsi sebagai penyusun kebijakan teknis di bidang keuangan subpengelolaan pendapatan daerah; pelaksana tugas dukungan teknis di bidang keuangan subpengelolaan pendapatan daerah; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan subpengelolaan pendapatan daerah; pembinaan teknis di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah; serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsi Bapenda.

Secara tupoksi dan struktur birokrasi dalam sistem pemerintahan, Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang berkorelasi dengan tupoksi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Keuangan. Dalam menetapkan programnya, Badan Pendapatan Daerah mengacu kepada program yang ditetapkan RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026. Korelasi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi daerah, khususnya terhadap tugas pokok dan fungsi Bapenda sebagai koordinator bidang pendapatan daerah.

Bapenda memiliki indikator tujuan Kategori Kapasitas Fiskal yang diperoleh dengan rumusan dari Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah, indikator kinerja utama Bapenda yaitu :

1. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam renstra, disajikan pada tabel, 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKU	Target Renstra		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Kategori Kapasitas Fiskal (Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah)	-	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3,29%	3,29%	13,59%	14,03%	15%	3,53%	(Realisasi PAD tahun (n) – Realisasi PAD tahun (n-1)) : Realisasi PAD tahun (n-1)
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	83	84,7	84,83	85	82	Nilai IKM dari penilaian survey dari Pemerintah Kota Bontang terhadap Pelayanan Bapenda

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa target persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan nilai indeks kepuasan Masyarakat (IKM) dari tahun ke tahun diproyeksikan terus meningkat. Realisasi capaian IKU 1 (persentase peningkatan PAD) pada tahun 2023 bernilai – (minus) hal ini disebabkan karena Persentase peningkatan pendapatan asli daerah pada tahun berkenaan dipengaruhi oleh realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2021.

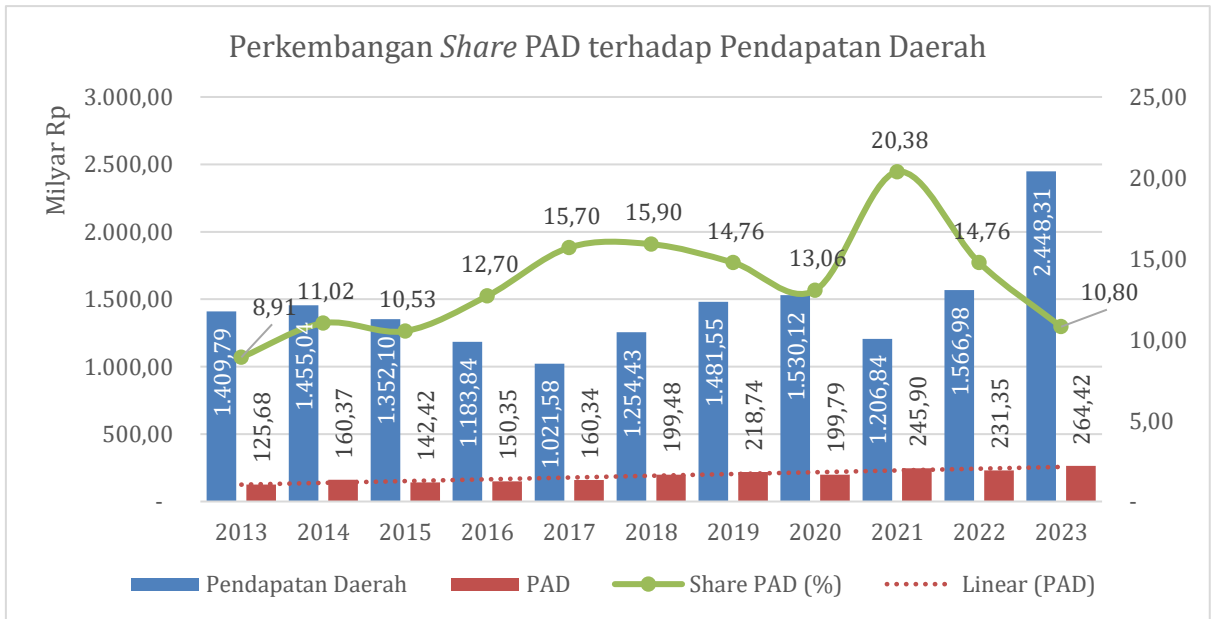
Pada Tahun 2022 realisasi pendapatan jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada tahun 2021, hal ini disebabkan karena kondisi perekonomian yang masih dalam tahap penataan kembali pasca covid-19, dimana kondisi ekonomi di Kota Bontang khususnya sudah mulai berkembang dan menunjukkan trend yang positif. Realisasi capaian IKU 1 (persentase peningkatan PAD) pada tahun 2023 juga terus berada pada kondisi yang prima dimana capaian persentase peningkatan PAD adalah sebesar 13,59% dengan nominal capaian pendapatan asli daerah sebesar Rp 262.783.368.861,61 dengan jumlah realisasi pajak daerah sebesar Rp 118.218.692.064,81 atau 44,99% dari jumlah keseluruhan pendapatan asli daerah. Realisasi capaian IKU 1 (persentase peningkatan PAD) pada tahun 2024 masih berada pada kondisi positif dimana capaian pendapatan asli daerah sebesar Rp 329.657.276.443,99 dengan rincian realisasi pajak daerah sebesar Rp 150.018.177.986,95

Sedangkan untuk realisasi capaian IKU 2 (nilai IKM) pada tahun 2024 adalah sebesar 84,83 dari target renstra dengan nilai 83, survey penilaian indeks kepuasan masyarakat dilakukan dalam 2 kali, yaitu pada semester pertama dilakukan penilaian mandiri oleh setiap instansi, dan semester kedua dilakukan langsung oleh pemerintah kota. Realisasi nilai IKM Bapenda pada semester I tahun 2025 adalah 91.156 (baik sekali).

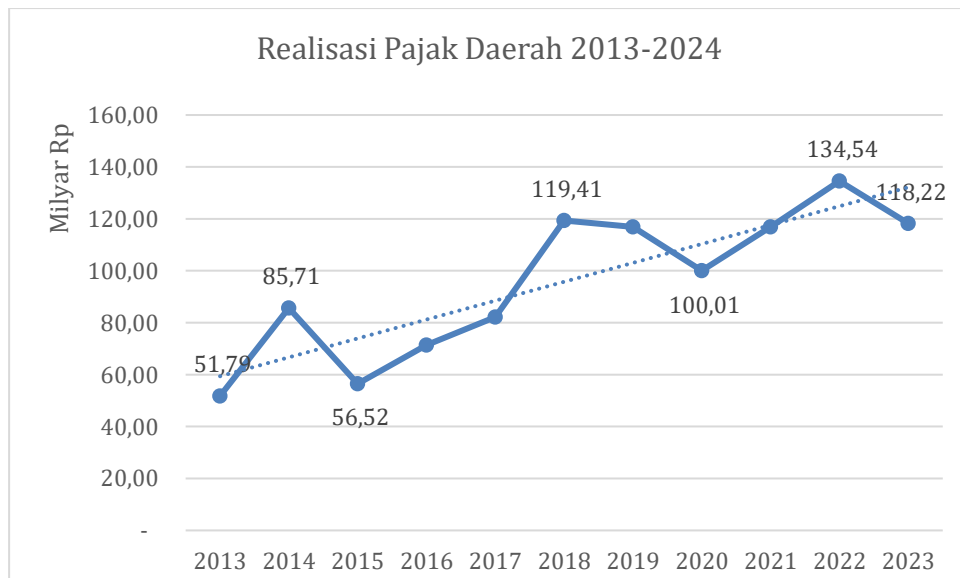
Untuk proyeksi capaian indikator kinerja utama Bapenda di tahun 2026 direncanakan terus meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini tentunya agar kinerja dari Badan Pendapatan Daerah dapat terus berada pada tingkat yang baik, dan juga sebagai pecutan terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah agar dapat terus melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

Sebagai perangkat daerah yang kinerja utamanya menunjang kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi potensi pendapatan daerah, Bapenda sejak awal ditetapkan sebagai Organisasi Perangkat Daerah dihadapkan pada isu rendahnya Tingkat kemandirian fiskal daerah yang ditandai oleh proporsi PAD terhadap keseluruhan Pendapatan Daerah masih dibawah 15 persen, bahkan dalam kurun waktu 2013-2024 cenderung mengalami penurunan, meskipun tetap mengalami peningkatan berdasarkan nilai absolut.

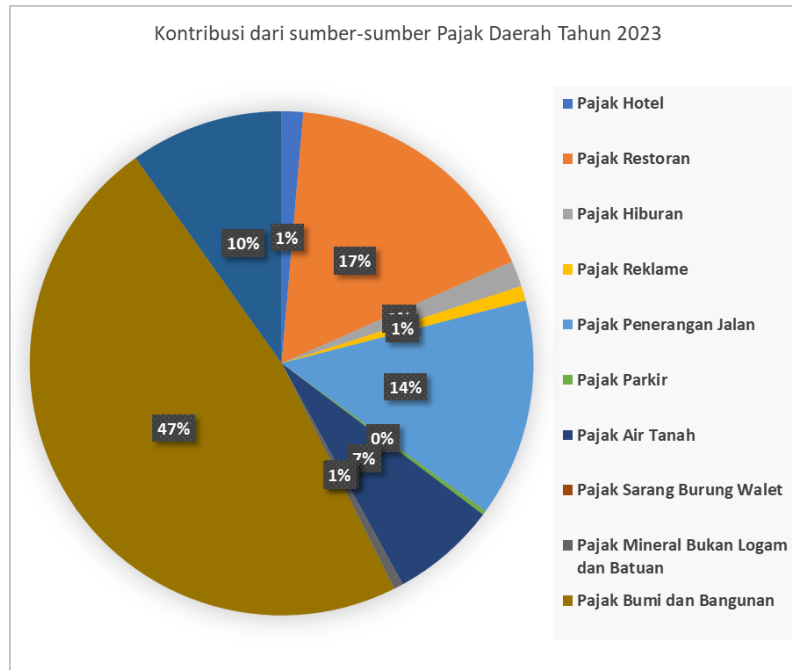


Sejalan dengan isu kemandirian fiskal yang masih rendah tersebut, sebagai perangkat daerah yang secara teknis melaksanakan tugas pengelolaan dan penatausahaan perpajakan daerah, Bapenda masih dihadapkan pula pada belum optimalnya penerimaan pajak daerah. Meskipun realisasi Pajak daerah menunjukkan tren yang meningkat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, namun peningkatan tersebut belum signifikan menopang peningkatan PAD sebagai indikator utama kemandirian pembiayaan Pembangunan daerah.



Realisasi sumber pendapatan dari Pajak Daerah dalam periode 2013-2024 relatif berfluktuasi, namun menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2025, terdapat penyesuaian kode rekening pendapatan pajak daerah serta penambahan sumber pendapatan dari opsen PKB dan opsen BBNKB. Realisasi penerimaan Pajak Daerah terbesar bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan dengan kontribusi mencapai 47 persen, Pajak Restoran 17 persen dan Penerangan Jalan 14 persen. Secara

keseluruhan distribusi sebelas sumber Pajak Daerah selengkapnya ditampilkan pada gambar berikut:



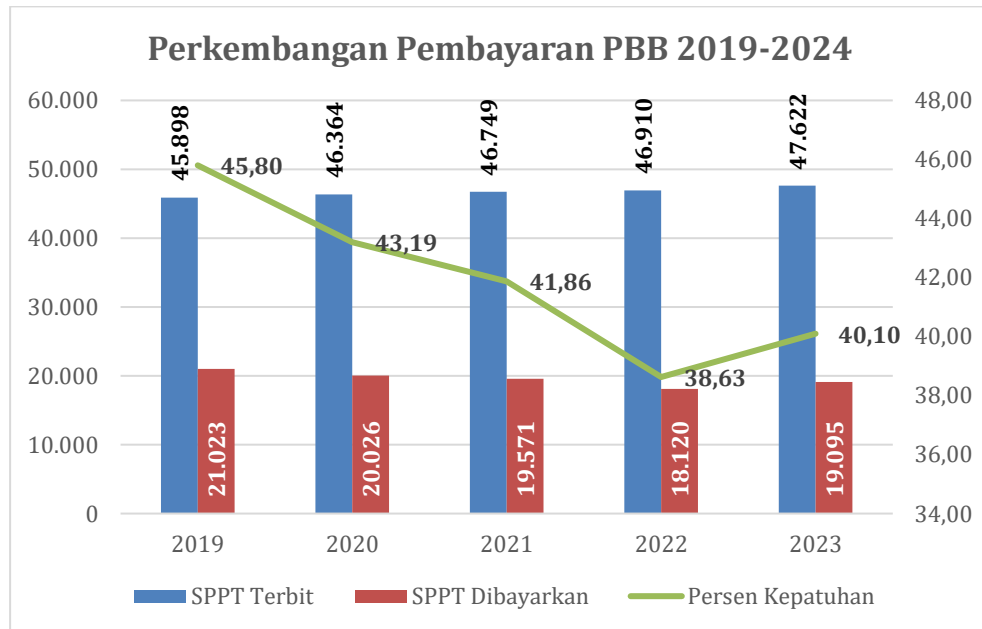
Terlepas dari distribusi dan fluktuasi realisasi penerimaan Pajak Daerah tersebut, terdapat fakta yang menunjukkan bahwa terjadi tren peningkatan nilai pajak yang tertunggak dengan jumlah wajib pajak yang menunggak meningkat pula. Secara akumulatif nilai tunggakan yang menjadi piutang PBB hingga tahun 2024 telah mencapai Rp53,4 Milyar. Adapun perkembangan Penetapan, Pembayaran, dan Tunggakan PBB secara tahunan selama lima tahun terakhir 2019-2024 disajikan pada table berikut:

Tabel 2.5
Perkembangan Pembayaran dan Tunggakan PBB Tahun 2019-2024

Tahun	SPPT Terbit	Nilai Penetapan	Nilai Pembayaran PBB	Nilai Tunggakan PBB	Persen
2019	45.898	42.102.683.121,00	37.001.663.143,00	5.101.019.978,00	12,12
2020	46.364	45.331.166.591,00	37.558.848.481,00	7.772.318.110,00	17,15
2021	46.749	45.219.264.685,00	37.663.565.672,00	7.555.699.013,00	16,71
2022	46.910	45.974.222.644,00	37.636.596.389,00	8.359.924.205,00	18,18
2023	47.622	61.433.754.028,00	53.517.019.995,00	7.916.734.033,00	12,89
2024					

Dari perspektif nilai penetapan PBB sesuai SPPT yang diterbitkan, rata-rata nilai tunggakan setiap tahunnya selama tahun 2019-2024 mencapai 15,4 persen dengan tren yang menunjukkan peningkatan. Demikian pula memperhatikan jumlah SPPT dengan kategori menunggak atau tidak dilakukan pembayaran oleh wajib pajak PBB. Jumlahnya juga menunjukkan peningkatan. Dengan membandingkan antara jumlah SPPT yang diterbitkan dengan jumlah SPPT yang dibayarkan oleh WP PBB, maka dapat dilihat tren kepatuhannya

menunjukkan penurunan dari 45% pada tahun 2015, menjadi 40 persen pada tahun 2024.



Pada kelompok Pajak Daerah lainnya, permasalahan tunggakan pajak juga menunjukkan peningkatan. Namun demikian secara persentase nilai tunggaknya relatif lebih kecil. Terjadi peningkatan tunggakan pajak-pajak daerah Non PBB dan BPHTB pada tahun 2024 baik pada aspek jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun nilai pajaknya jika dibandingkan realisasi tahun 2023. Hal ini seharusnya menjadi perhatian dan menjadi bahan evaluasi agar peningkatan tunggakan dan selanjutnya menjadi piutang ini tidak berlanjut pada tahun-tahun selanjutnya sebagaimana terjadi pada objek pajak PBB dan BPHTB.

Tabel 2.6
Perkembangan Penetapan SKPD dan Tunggakan Pajak Non PBB dan BPHTB Tahun 2021-2024

Tahun	Penerbitan SKPD	Nilai Ketetapan SKPD	SKPD Menunggak	Nilai SKPD Menunggak	Persen
2021	6.244	57.552.845.914,10	25	33.817.598,00	0,06
2022	7.592	52.296.428.081,74	75	65.407.527,00	0,13
2023	9.509	50.162.060.190,42	276	591.575.809,00	1,18
2024					

Tren meningkatnya tunggakan dan piutang pajak, menjadi salah satu permasalahan prioritas sehubungan dengan isu strategis masih rendahnya kemandirian fiskal Kota Bontang. Oleh karena itu menjadi sangat penting dan strategis bagi Bapenda menyusun strategi dan kebijakan intervensi dengan pendekatan dan terobosan yang tepat agar secara efektif dapat menjadi solusi atas tren peningkatan tunggakan dan

piutang pajak daerah ini. Selanjutnya dalam jangka Panjang dapat menjadi stimulasi peningkatan pendapatan Pajak Daerah sebagai salah satu sumber untuk menopang kemandirian fiskal daerah.

Sejalan dengan analisis isu strategis diatas, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah juga menghadapi isu-isu penting sebagai berikut:

1. Sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai kontribusi pajak daerah terhadap kualitas pembangunan yang dilaksanakan, efek langsung apa yang akan dirasakan masyarakat ketika mereka telah membayar pajak, serta apresiasi sebesar-besarnya terhadap seluruh masyarakat yang dengan taat dan sadar telah membayar pajak.
2. Penguatan dasar hukum atau peraturan yang mendukung langsung pelayanan pajak dan retribusi daerah. Dasar hukum atau peraturan menjadi syarat utama agar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilaksanakan setiap tahunnya, implementasi atas sisdur pemungutan pajak dan retribusi daerah harus dijalankan dengan dasar yang kuat untuk meminimalisir risiko yang mungkin akan terjadi dimasa mendatang
3. Kerjasama antar instansi yang mendukung optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah. Komponen pendapatan asli daerah yang beragam serta tidak hanya berada pada satu instansi saja membutuhkan kerjasama yang apik antar instansi-intansi tersebut, Badan Pendapatan Daerah berusaha terus menjembatani instansi-instansi lain yang bergerak dibidang pendapatan asli daerah untuk sama-sama memaksimalkan potensi penerimaan pendapatan asli daerah yang ada serta terus mempertahankan trend pendapatan asli daerah yang terus naik dengan positif.
4. Pelaksanaan kegiatan validasi data pajak daerah. Selain melakukan upaya pengecekan langsung ke lapangan untuk mendapatkan data wajib pajak yang valid, Badan Pendapatan Daerah juga melaksanakan upaya validasi data secara besar-besaran dengan memanfaatkan teknologi yang semakin maju, bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM), Badan Pendapatan Daerah memanfaatkan Lidar untuk penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) agar data yang dihasilkan dapat dijamin keakuratannya.
5. Peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu tolak ukur kepercayaan publik terhadap pelayanan yang dilakukan pemerintah. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, akan berbanding positif dengan jumlah penerimaan pajak daerah.
6. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan pajak daerah. Terbatasnya loket pembayaran serta ruang tunggu antrian pelayanan pajak daerah memaksa Badan Pendapatan Daerah untuk terus melakukan optimalisasi

kegiatan pelayanan dalam kondisi yang terbatas, hal ini tentunya akan menimbulkan risiko berkepanjangan apabila tidak segera ditemukan solusi yang pasti. Akan tetapi Badan Pendapatan Daerah terus melakukan upaya-upaya yang nyata agar masyarakat bisa membayar pajak daerah tanpa harus menguras tenaga, salah satu upayanya adalah elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dimana pembayaran pajak daerah dapat dilakukan dari rumah melalui channel pembayaran yang ada, selain itu Badan Pendapatan Daerah juga melaksanakan kegiatan Jemput Bola langsung kepada masyarakat yang berlokasi di seluruh kelurahan yang ada di Kota Bontang.

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang.

Identifikasi permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah antara lain :

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pelaksanaan pengendalian serta pengawasan yang belum berjalan dengan optimal membuat Badan Pendapatan Daerah harus melakukan kegiatan yang sama dengan target serta jangkauan yang lebih luas dengan dukungan anggaran yang tentunya terbatas. Selain itu, kurang adanya keterbukaan dari wajib pajak utamanya yang menjalankan mekanisme *self assessment* terkait omset bulanan/tahunan mereka juga ikut mempengaruhi tingkat capaian realisasi pajak daerah
2. Kurang validnya data yang ada pada database saat ini utamanya data wajib pajak PBBP2. Besarnya jumlah wajib pajak PBBP2 tidak sebanding dengan jumlah petugas lapangan yang ada sehingga kegiatan pengecekan langsung ke lapangan hanya akan dilakukan ketika wajib pajak mengajukan permohonan untuk peninjauan ulang terhadap aset yang mereka miliki. Hal inilah yang menjadi kendala Badan Pendapatan Daerah hingga saat ini.
3. Perumusan potensi pendapatan asli daerah yang kurang realistis sehingga penentuan target pendapatan asli daerah, utamanya pajak daerah masih dirasa kurang maksimal.
4. Realisasi fisik dan belanja Badan Pendapatan Daerah yang masih dibawah target yang ditentukan, pada triwulan II tahun 2025 yang seharusnya target realisasi keuangan dan fisik mencapai 50%, namun realisasi fisik dan keuangan Badan Pendapatan Daerah masih berada pada kisaran angka 20%. Hal ini tentu mempengaruhi kinerja Badan Pendapatan Daerah secara keseluruhan, dimana seharusnya kondisi seperti ini harus dapat diantisipasi agar tidak terjadi.

2.3.2 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang dalam pencapaian kinerja pada indikator dalam peningkatan PAD, alternatif yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Perubahan regulasi terkait pengelolaan PAD yang rutin terjadi
2. Minimnya potensi daerah sehingga menghambat laju ekstensifikasi PAD
- 3.
4. Melakukan percepatan kajian terkait kebijakan regulasi terbaru.
5. Memberikan sosialisasi dan pemahaman akan pentingnya pajak daerah serta melakukan jemput bola langsung ke masyarakat atau wajib pajak
6. Melakukan peningkatan sosialisasi melalui media elektronik maupun masyarakat terkait perpajakan
7. Dilaksanakan validasi atau pemutakhiran data wajib pajak.
8. Mendorong adanya inovasi yang mendukung upaya peningkatan pendapatan asli daerah

2.3.3 Rekomendasi dan Catatan Strategis untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan pada Tahun yang Direncanakan.

Langkah-langkah strategis untuk ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan pada Tahun yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Memaksimalkan sumber daya aparatur yang tersedia dengan meningkatkan kemampuan dan kinerja melalui kegiatan-kegiatan bimtek, diklat, kursus atau sejenisnya.
2. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis yang membidangi terkait pendapatan asli daerah lainnya dan pihak terkait dalam rangka mengatasi permasalahan terkait pengelolaan pendapatan daerah.
3. Melakukan sinergitas program dan kegiatan dengan rencana pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah.
4. Membuat kebijakan terkait dengan perpajakan maupun penerimaan lainnya serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran membayar pajak.
5. Mengidentifikasi potensi-potensi penerimaan bagi peningkatan pendapatan daerah.
6. Peningkatan pelayanan publik dalam pencairan dana sesuai dengan standar dan prosedur kerja yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan masing-masing.
7. Melaksanakan pemutakhiran data wajib pajak untuk PBB-P2 dan pajak daerah lainnya.

8. Melaksanakan dan merealisasikan penghapusan piutang pajak berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.
9. Membuat inovasi dalam pengembangan sistem pelayanan pajak daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2026 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target dan besaran dana yang dibutuhkan.

Pada tahun anggaran 2026 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.7
Review Rancangan Awal Terhadap RKPD Tahun 2026
Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bontang	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	23.004.584.800	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bontang	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	23.004.584.800	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bontang	Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	100 Persen	2.739.040	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bontang	Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu	100 Persen	2.739.040	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	684.760	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	684.760	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bontang	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2 Dokumen	684.760	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bontang	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2 Dokumen	684.760	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	2 Dokumen	684.760	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	2 Dokumen	684.760	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	684.760	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	684.760	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bontang	Tingkat pemenuhan administrasi dan Laporan Perangkat Daerah	100 Persen	17.136.027.346	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bontang	Tingkat pemenuhan administrasi dan Laporan Perangkat Daerah	14 Dokumen	17.136.027.346	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/Bulan	17.039.207.826	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/Bulan	17.039.207.826	

2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	95.450.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	95.450.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	684.760	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	1 Laporan	684.760	
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bontang	Jumlah Dokumen Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	684.760	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	684.760	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bontang	Tingkat pemenuhan administrasi dan Laporan Perangkat Daerah	100 persen	150.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bontang	Tingkat pemenuhan administrasi dan Laporan Perangkat Daerah	100 persen	150.500.000	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	150.500.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bontang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	430 Orang	150.500.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bontang	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan administrasi perkantoran	100 persen	2.232.516.205	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bontang	Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan administrasi perkantoran	12 Bulan	2.232.516.205	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.886.446	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.886.446	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	368.944.079	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	368.944.079	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.255.755	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bontang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.255.755	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bontang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	99.786.925	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bontang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	99.786.925	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.746.643.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.746.643.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bontang	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Daerah	100 persen	3.056.769	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bontang	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Daerah	100 persen	3.056.769	

1	Pengadaan Mebel	Kota Bontang	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Unit	3.056.769	Pengadaan Mebel	Kota Bontang	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Unit	3.056.769	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bontang	Tingkat Pemenuhan Jasa Layanan Umum Perkantoran	100 persen	2.853.305.440	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bontang	Tingkat Pemenuhan Jasa Layanan Umum Perkantoran	100 persen	2.853.305.440	
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.950.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.950.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	360.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	360.000.000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.488.355.440	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bontang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.488.355.440	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bontang	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100 persen	626.440.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bontang	Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100 persen	626.440.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	250.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	250.000.000	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bontang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	76.450.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bontang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	76.450.000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Kota Bontang	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	299.990.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bontang	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	299.990.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100 persen	3.008.378.465	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100 persen	3.008.378.465	
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 persen	3.008.378.465	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 persen	3.008.378.465	

1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 dokumen	69.406.510	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 dokumen	69.406.510	
2	Analisa dan Pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 dokumen	151.761.060	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 dokumen	151.761.060	
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan	280.628.324	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan	280.628.324	
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 unit	170.681.770	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 unit	170.681.770	
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	30.000 Laporan	61.669.520	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	30.000 Laporan	61.669.520	
6	Pengolahan, pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data pajak daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	104.813.800	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	104.813.800	
7	Penilaian Pajak bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	15000 objek pajak	1.100.784.805	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBBP2) serta Bea perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB)	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	15000 objek pajak	1.100.784.805	
8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	30.000 Dokumen	373.472.500	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	30.000 Dokumen	373.472.500	
9	Pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11 Layanan	128.527.130	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11 Layanan	128.527.130	
10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	13 Dokumen	50.186.848	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	13 Dokumen	50.186.848	

11	Penagihan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	2 Dokumen	72.181.632	Penagihan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	2 Dokumen	72.181.632	
12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	50.612.218	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	50.612.218	
13	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan pajak daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen	121.396.460	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen	121.396.460	
14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	121.266.428	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	121.266.428	
15	Elektronifikasi Transaksi pemerintah Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Tarnsaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan	150.989.460	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Tarnsaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan	150.989.460	
					26.012.963.265	TOTAL					26.012.963.265

Berdasarkan tabel 2.3 review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026 dengan analisis kebutuhan Badan Pendapatan Daerah yaitu dengan 2 (dua) Program, 8 (delapan) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan pada rancangan awal RKPD pagu indikatif sebesar Rp. 26.012.963.265,- (Dua Puluh Enam Milyar Dua Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 26.012.963.265,- (Dua Puluh Enam Milyar Dua Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah). Dengan rincian penambahan sebagai berikut :

- a. Penyesuaian jumlah pegawai baik ASN maupun Non ASN
- b. Penyesuaian jumlah belanja wajib bersifat rutin seperti pembayaran listrik, pembayaran internet, pembayaran air, pemeliharaan kendaraan, belanja bbm, pemeliharaan peralatan kantor
- c. Pemeliharaan aplikasi yang ada pada Badan Pendapatan Daerah
- d. Pelaksanaan kegiatan lanjutan pasca kegiatan pemetaan menggunakan lidar
- e. Pelaksanaan kegiatan validasi data pajak daerah
- f. Pelaksanaan sosialisasi mengenai regulasi pajak daerah, serta mengenai pajak daerah secara khusus
- g. Pelaksanaan kegiatan rutin pelayanan serta penagihan pajak daerah
- h. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan pajak daerah
- i. Penyusunan kajian mengenai potensi pendapatan asli daerah
- j. Pelaksanaan bimbingan teknis bagi petugas pelayanan pajak daerah
- k. Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan pendapatan asli daerah
- l. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi-instansi terkait lainnya

BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 memuat arah kebijakan nasional 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian, kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi, kerangka pelayanan umum dan investasi dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026 disusun sebagai pedoman pelaksanaan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berbasis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, yang memuat 7 (tujuh) Program Nasional meliputi :

- a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.;
- b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- c. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar ;
- f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, perubahan iklim;
- g. Meningkatkan stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Kebijakan keuangan daerah sebagai salah satu kewenangan yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi salah satu instrumen penting untuk mendesain dan mengarahkan kebijakan pembangunan daerah untuk meningkatkan kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur Pendapatan dan Belanja Daerah, karena besaran pendapatan akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Bapenda Kota Bontang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, dengan konsentrasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan memberikan jaminan ketersediaan anggaran melalui realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah mengacu pada Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis

dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang tahun 2025 adalah Meningkatnya Kemandirian Fiskal di Daerah. Dengan indikator tujuannya, yaitu “Kategori Kapasitas Fiskal (Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah)”.

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang tahun 2026 adalah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Dengan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

1. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sebagai bagian dari pencapaian tujuan dan sasaran Bapenda tahun 2026 dan sejalan dengan isu strategis sebagaimana dijelaskan pada Bab II, dalam Renja tahun 2026 Bapenda melaksanakan inovasi dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya terkait dengan upaya meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan melalui program BAPENDA MENGAJAR dengan sasaran para pelajar SMA/MA/SMK dan juga menyelenggarakan bimbingan teknis bagi wajib pajak. Inovasi juga dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan perpajakan daerah melalui program pelayanan pajak keliling di setiap kelurahan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2026

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Penyusunan Program /kegiatan/ sub kegiatan dan kinerja serta indikator sub kegiatan telah dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Kementrian Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tanggal 27 desember 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Hal tersebut dapat dilihat pada table 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi dan Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	xx	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bontang	Persen	23.004.584.800	Dana Umum (APBD)		100%	18.524.000.000,00
x	xx	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kota Bontang	Dokumen	2.739.040	Dana Umum (APBD)		19 Dokumen	6.025.888
x	xx	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bontang	Dokumen	684.760	Dana Umum (APBD)		2 Dokumen	1.369.520
x	xx	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Bontang	Dokumen	684.760	Dana Umum (APBD)		2 Dokumen	1.643.424
x	xx	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kota Bontang	Dokumen	684.760	Dana Umum (APBD)		2 Dokumen	1.643.424

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi dan Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	xx	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bontang	Laporan	684.760	Dana Umum (APBD)		1 Laporan	1.369.520
x	xx	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	Kota Bontang	Dokumen	17.136.027.346	Dana Umum (APBD)		78 Dokumen	13.629.245.902
x	xx	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bontang	Orang/Bulan	17.039.207.826	Dana Umum (APBD)		43 Orang/bulan	13.531.056.862
x	xx	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Bontang	Dokumen	95.450.000	Dana Umum (APBD)		12 Dokumen	95.450.000
x	xx	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bontang	Laporan	684.760	Dana Umum (APBD)		1 Laporan	1.369.520
x	xx	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Bontang	Dokumen	684.760	Dana Umum (APBD)		1 Dokumen	1.369.520
x	xx	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kota Bontang	Persen	150.500.000	Dana Umum (APBD)		1	129.500.000

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi dan Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	xx	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bontang	Orang	150.500.000	Dana Umum (APBD)		15 Orang	129.500.000
x	xx	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	Kota Bontang	Persen	2.232.516.205	Dana Umum (APBD)		100 persen	1.209.584.967
x	xx	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bontang	Paket	6.886.446	Dana Umum (APBD)		1 Paket	6.886.446
x	xx	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bontang	Paket	368.944.079	Dana Umum (APBD)		6 Paket	120.947.132
x	xx	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bontang	Paket	10.255.755	Dana Umum (APBD)		1 Paket	10.255.755
x	xx	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bontang	Paket	99.786.925	Dana Umum (APBD)		1 Paket	69.95.634
x	xx	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bontang	Dokumen				2 Dokumen	1.545.000

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi dan Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	xx	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bontang	Laporan	1.746.643.000	Dana Umum (APBD)		12 Laporan	1.000.000.000
x	xx	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan	Kota Bontang	Persen	3.056.769	Dana Umum (APBD)		100%	13.811.203
x	xx	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kota Bontang	Unit	3.056.769	Dana Umum (APBD)		6 Unit	13.811.203
x	xx	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	Kota Bontang	Persen	2.853.305.440	Dana Umum (APBD)		100%	2.564.948.000
x	xx	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bontang	Laporan	4.950.000	Dana Umum (APBD)		1 Laporan	4.950.000
x	xx	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	Kota Bontang	Laporan	360.000.000	Dana Umum (APBD)		12 Laporan	360.000.000
x	xx	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bontang	Laporan	2.488.355.440	Dana Umum (APBD)		12 Laporan	2.199.998.000
x	xx	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan BMD	Kota Bontang	Persen	626.440.000	Dana Umum (APBD)		100%	426.450.000

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi dan Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	xx	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bontang	Unit	250.000.000	Dana Umum (APBD)		34 Unit	350.000.000
x	xx	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bontang	Unit	76.450.000	Dana Umum (APBD)		1 Unit	76.450.000
x	xx	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Bontang	Unit	299.990.000	Dana Umum (APBD)		1 Unit	0
x	xx	04				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	Kota Bontang	Persen	3.008.378.465	Dana Umum (APBD)		100%	3.546.977.509
x	xx	04	2	01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Bontang	Persen	3.008.378.465	Dana Umum (APBD)		100%	3.546.977.509
x	xx	04	2	01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Bontang	Dokumen	69.406.510	Dana Umum (APBD)		2 Dokumen	43.039.060
x	xx	04	2	01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Bontang	Dokumen	151.761.060	Dana Umum (APBD)		2 Dokumen	133.779.200

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi dan Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	xx	04	2	01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	Kota Bontang	Laporan	280.628.324	Dana Umum (APBD)		3 Laporan	373.734.324
x	xx	04	2	01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Bontang	Unit	170.681.770	Dana Umum (APBD)		2 Unit	135.576.000
x	xx	04	2	01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Kota Bontang	Laporan	61.669.520	Dana Umum (APBD)		30.000 Laporan	61.943.424
x	xx	04	2	01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Bontang	Laporan	104.813.800	Dana Umum (APBD)		2 Laporan	80.236.800
x	xx	04	2	01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang d disesuaikan NJOP nya	Kota Bontang	Obyek Pajak	1.100.784.805	Dana Umum (APBD)		15.000 Obyek Pajak	1.752.782.423
x	xx	04	2	01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Kota Bontang	Dokumen	373.472.500	Dana Umum (APBD)		30.000 Dokumen	358.062.500

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi dan Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x xx 04 2 01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Bontang	Layanan	128.527.130	Dana Umum (APBD)		11 Layanan	110.077.754
x xx 04 2 01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Kota Bontang	Dokumen	50.186.848	Dana Umum (APBD)		13 Dokumen	61.943.424
x xx 04 2 01 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kota Bontang	Dokumen	72.181.632	Dana Umum (APBD)		2 Dokumen	59.647.823
x xx 01 2 01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Bontang	Dokumen	50.612.218	Dana Umum (APBD)		1 Dokumen	13.143.424
x xx 04 2 01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Bontang	Dokumen	121.396.460	Dana Umum (APBD)		4 Dokumen	106.887.225
x xx 04 2 01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Bontang	Laporan	121.266.428	Dana Umum (APBD)		4 Laporam	121.266.428
x xx 04 2 01 15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Tarnsaksi Pemerintah Daerah	Kota Bontang	Laporan	150.989.460	Dana Umum (APBD)		2 Laporan	134.857.700
Total					Rp26.012.963.265				Rp21.526.543.469

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2026 merupakan wujud dan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026. Rencana Kerja merupakan bagian tahapan dalam pelaksanaan suatu perencanaan dimana tujuan akhir yang diharapkan adalah adanya pedoman dan acuan dalam proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan,

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2026 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah. Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang.

Demikian semoga dokumen Renja Badan Pendapatan Daerah ini dapat menjadi acuan demi tercapainya tujuan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang.